

**KEBIJAKAN PEMERINTAH THAILAND BERPARTISIPASI DI ASEAN
TOURISM FORUM (ATF) DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI
PARIWISATA TAHUN 2011-2015**

Oleh :

Dwi Putri Fajryani¹

putrifajryani@gmail.com

Pembimbing: Drs.Syafri Harto, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research describes the policy of Thailand Government participate in the implementation of the ATF in the improvement of the tourism industry in 2011-2015. ASEAN Tourism Forum is a forum of the largest tourism in the ASEAN region. These activities are routinely held each year involving all sectors of the tourism industry from all member countries of ASEAN. In 2011, ATF meeting held in Phnom Penh, Cambodia agree on some specific strategies in the field of tourism which aims to make ASEAN as a single destination for foreign tourists. Earlier, Thailand by Prime Minister Thaksin Shinawatra has proposed the idea of a single application of the visa in the sub-region ASEAN. The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from the books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the policy of Thailand Government participate in the implementation of the ATF in the improvement of the tourism industry in 2011-2015. The theories applied in this research is decision making theory by Richard Snyder about internal and external factors. This research shows that basically Thailand strongly support and encourage other countries to prepare to welcome the implementation of the policy. In addition, Thailand contributed to cooperate and assist countries in order to accelerate the implementation of the single visa scheme throughout Southeast Asia. Thailand started to implement single visa policy with Cambodia.

Key words : Policy, ASEAN Tourism Forum, Participate, Thailand.

¹ Mahasiswi Jurusan Ilmu Hubungan Internasioal FISIP UR Angkatan 2011

I. Pendahuluan

Pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan seterusnya.² Hunziker dan Kraft mendefinisikan pariwisata sebagai keseluruhan hubungan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing dan perjalanannya itu tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari nafkah.³

The World Travel & Tourism Council dan Organisasi Pariwisata Dunia menekankan tiga peran pariwisata :

1. Melalui penciptaan perusahaan yang berkesinambungan dan pekerjaan yang layak, pariwisata memberikan keamanan yang diperlukan dan stabilitas bagi jutaan orang di seluruh dunia untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
2. Pariwisata merupakan salah satu sektor ekspor negara-negara berkembang dan sumber devisa utama di sebagian besar negara-negara ini, menciptakan banyak pekerjaan yang dibutuhkan dan peluang untuk pengembangan. Pada saat yang sama, ia memiliki kekuatan untuk memberikan pendapatan internasional yang signifikan untuk perlindungan lingkungan serta memberikan nilai ekonomi

untuk warisan budaya. Hal ini juga membawa orang bersamasama untuk belajar dan memahami satu sama lain, mendorong saling menghormati dan toleransi.

3. Kegiatan pariwisata terus berkembang, pariwisata semakin saling berhubungan dengan lingkungan keberlanjutan. Lingkungan pariwisata yang bertanggung jawab adalah salah satu kutub pertumbuhan baru 'ekonomi hijau', menyediakan infrastruktur berkelanjutan, peluang bisnis

Thailand menyadari bahwa pariwisata merupakan potensi besar yang dimiliki negaranya. Jika dilihat dari sumber daya yang digunakan, sektor pariwisata memiliki keunggulan karena dalam pemanfaatannya sebagian sumber daya pariwisata termasuk yang dapat diperbaharui. Thailand memiliki visi untuk menjadi tujuan wisata dunia yang berkualitas dengan daya saing pariwisata bertaraf internasional, sehingga menghasilkan lebih banyak pendapatan negara.

Sumbangan sektor pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung untuk negara ASEAN sekitar 8-9% dari PDB dan menciptakan 1 dari 11 pekerjaan. Berdasarkan laporan *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), ASEAN merupakan kawasan yang memiliki tingkat pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) tertinggi di dunia pada tahun 2013 dan diproyeksikan masih baik kedepan yang akan mencapai 10,3% dari total wisman global pada tahun 2030. Peningkatan ini perlu diimbangi dengan kualitas pariwisata yang memiliki daya saing. Oleh karena itu, *ASEAN Tourism Forum* (ATF) sebagai forum wisata

² I Putu Sudana, 2013. *Strategi Pengembangan Desa Wisata Ekologis Di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan*. Jurnal Pariwisata Vol.13 No.1 2013. (Universitas Udayana) Hlm. 13

³ Mulyadi A.J. 2010. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 7-8

terbesar di kawasan Asia Tenggara melakukan serangkaian upaya yang tertuang dalam *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2011-2015*. Pada tahun 1981, ATF didirikan untuk pertama kalinya dan diselenggarakan di Genting Highland, Malaysia. Setiap tahunnya, ATF rutin diselenggarakan serta melibatkan semua sektor dalam industri pariwisata dari sepuluh negara ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam.⁴

Menurut data yang dikeluarkan *Pacific Asia Travel Association –Asia Pacific Visitor Arrival Forecasts 2014-2018*, Thailand menjadi negara dengan kunjungan wisatawan terbanyak di Asia Tenggara pada tahun 2013 dengan angka 26,5 juta orang. Dimana Thailand mampu unggul dari Malaysia dan Singapura. Pada tahun 2013 kontribusi sektor pariwisata 16,7 % atau jauh melebihi kontribusi industri otomotif yang hanya 9,09%, pariwisata berada di urutan kedua setelah sektor pertanian.⁵

Sementara itu persaingan industri pariwisata di Asia Tenggara dari waktu ke waktu semakin ketat. Jika dilihat dari *ASEAN Travel & Tourism Competitiveness Index* Tahun 2011, daya saing Thailand berada diperingkat ke-3 dibawah Malaysia dan Singapura. Negara-negara di Asia Tenggara dengan gencarnya mempromosikan pariwisatanya ke dunia Internasional seperti Malaysia dengan *tagline* “*The*

Truly Asia”, dan Singapura dengan *tagline* “*Uniquely Singapore*”.

Thailand memiliki beragam pilihan destinasi wisata bagi wisatawan yang ingin berkunjung kesana, dimana Bangkok dan Chiang Mai merupakan dua kota yang tergolong dalam sepuluh besar kota wisata yang paling baik di Asia dipilih oleh Majalah *Travel and Leisure* dari Amerika Serikat. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. Indra Nugraha MBA selaku Manajer *Tourism Authority of Thailand (TAT)* Head Office Jakarta menyebutkan 10 destinasi wisata terbaik yang dimiliki Thailand yaitu: 1. Bangkok; 2. Phuket; 3. Pattaya; 4. Chiang Mai; 5. Ko Samui; 6. Krabi; 7. Hat Yai; 8. Chiang Rai; 9. Ayutthaya; 10. Khao Yai. *Tourism Authority of Thailand* merupakan Dinas Pariwisata Thailand yang berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand.

II. Kerangka Dasar Teori

Kerangka teoritis disini mengemukakan dasar pemikiran serta penggunaan anggapan dasar dan teori-teori yang mendukung dalam permasalahan penelitian ini. Hal ini berfungsi untuk menentukan teori-teori dan konsep mana saja yang memberikan kontribusi, menjabarkan, menggambarkan, dan mendeskripsikan penelitian tersebut. Teori diartikan sebagai suatu gagasan atau kerangkak berfikir yang mengandung penjelasan ramalan atau anjuran pada setiap bidang penelitian.⁶ Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu neo-realisme.

Menurut Waltz⁷, level analisis adalah faktor-faktor penjelas, sementara

⁴ *Geliat Sektor Pariwisata ASEAN* dalam Buletin Komunitas ASEAN Edisi 4/ Maret 2014 hlm.62

⁵ *Thailand targetkan 3 besar dunia* dalam <http://www.bnsp.go.id/mod_lsp/content_lsp/009?id=17&menu=Thailand_Targetkan_3_besar_wisata_dunia> diakses pada 26 April 2015

⁶ Jack C Plano, Robert E Riggs, Helenan S. Robin, Kamus Analisa Politik. Jakarta. Rajawali pers, 1958. Hlm. 266

⁷ Kenneth Waltz, *Man, the State and War* (New York: Columbia University Press, 2001)

bagi Singer⁸ level analisis adalah target analisis di mana peneliti dapat memperoleh gambaran (*description*), penjelasan (*explanation*) dan perkiraan (*prediction*) yang akurat tentang perilaku negara. Dari beragam definisi lain tentang level analisis, ringkasnya level analisis akan membantu peneliti untuk menemukan variabel mana yang sangat menentukan tindakan aktor.⁹

Dalam penelitian ini menggunakan level analisis negara (*state-level analysis*). Pada level analisis ini, penjelasan tentang perilaku negara ditentukan oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut. Menurut Rourke¹⁰, yang diperlukan ketika seorang peneliti menggunakan level analisis negara adalah pemahaman tentang bagaimana berbagai aktor (birokrat, kelompok kepentingan dan badan legislatif) di dalam negara berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri.

Didalam penelitian ini kebijakan pemerintah Thailand berpartisipasi di *ASEAN Tourism Forum* (ATF) dikarenakan adanya faktor internal berupa peningkatan devisa negara. Seperti yang diketahui sektor pariwisata berada di urutan kedua setelah sektor pertanian yang memberikan kontribusi bagi pemasukan negara.

Konsep pariwisata

Kegiatan kepariwisataan adalah kegiatan yang mengutamakan pelayanan dengan berorientasi pada kepuasan wisatawan, pengusaha di bidang pariwisata, pemerintah dan

masyarakat. Sebagai salah satu aktifitas fisik dan psikis manusia, pariwisata didefinisikan oleh banyak ahli dengan definisi yang tidak terlalu jauh berbeda.

Teori

Penulis menggunakan Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri menurut Richard Snyder untuk menjelaskan apa yang melatar belakangi kebijakan tersebut dibuat. Proses pengambilan keputusan luar negeri merupakan alat yang dapat menjelaskan tindakan yang diambil oleh masing-masing negara dalam hubungan internasional. Dalam pandangan Snyder, proses pembuatan keputusan dimaksudkan untuk mengetahui apakah keputusan itu dapat mempengaruhi hasil atau tidak. Suatu hal yang penting juga adalah untuk mengetahui apakah perbedaan proses pembuatan keputusan juga akan menghasilkan keputusan yang juga berbeda dan apakah keterlibatan individu atau kelompok juga dapat mempengaruhi suatu hasil keputusan.

III. Metodologi Penelitian Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,¹¹ yaitu jenis penelitian dimana temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik ataupun bentuk hitungan lainnya. Disini penulis berupaya untuk memberikan penjelasan mengenai Kebijakan Pemerintah Thailand Berpartisipasi di *ASEAN Tourism Forum* (ATF) dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Tahun 2011-2015.

Teknik Pengumpulan Data

¹¹ Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

⁸ David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", *World Politics*, Vol. 14, No. 1 (1961), 77-92.

⁹ Yessi Olivia, *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*, Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 1, Juli 2013. (Universitas Riau)

¹⁰ John T Rourke, *International Politics on the World Stage*, 5th ed., (Connecticut: Dushking Publishing Group, 1995)

a. Studi Pustaka

Dalam penulisan ini teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data dan fakta-fakta dalam rangka pembahasan masalah dalam tesis ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti memanfaatkan buku-buku, jurnal, artikel-artikel dan berita-berita yang berasal dari berbagai media dan laporan-laporan resmi dari pemerintah. Dalam penelitian ini, penulis juga memperoleh data dari situs resmi ASEAN, situs Kementerian pariwisata dan oleh raga Thailand, dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Yaitu dengan mewawancarai narasumber, yang mana narasumber tersebut merupakan orang yang memang pakar dibidangnya. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui e-mail.

IV. Pembahasan

Sejarah Industri Pariwisata Thailand

Industri pariwisata Thailand telah menjadi industri unggulan sejak Perang Dunia ke-II. Thailand dianggap sebagai tujuan wisata yang matang di Asia Tenggara. Hal ini berkat berbagai produk pariwisata, jasa dan infrastruktur, strategi promosi dan citra global Thailand.¹² Sejarah pengembangan pariwisata Thailand dimulai pada tahun 1960-an, dimana pemerintah Thailand telah mengembangkan pariwisata dengan tujuan meningkatkan perekonomian. Setelah Perang Vietnam dimulai, Thailand menjadi salah satu

tujuan utama untuk istirahat dan rekreasi bagi tentara Amerika, dimana kunjungan ini membawa banyak pendapatan. Ketika perang berakhir, Thailand mengolah dengan baik sumber daya bagi penggunaan pariwisata dan dengan demikian mampu berhasil menarik banyak wisatawan Amerika dan Eropa. Pada tahun 1982 pariwisata Thailand melampaui beras sebagai pencari nafkah utama. pertukaran asing

ASEAN Tourism Forum

Pada tahun 1981, *ASEAN Tourism Forum* (ATF) dibentuk pertama kali di Genting Highlands, Malaysia. ATF merupakan indikasi mula akan keinginan dari negara-negara ASEAN untuk bekerja sama bagi kebaikan bersama setiap negara anggota. Melalui peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan dalam menghadapi masalah regional, setiap negara anggota ASEAN mendapatkan keuntungan dengan membagikan budaya yang dimiliki oleh masing – masing negara anggota ASEAN yang unik dan beragam ke seluruh dunia sebagai ciri khas ASEAN melalui pariwisata.¹³

Dengan adanya penyelenggaraan *ASEAN Tourism Forum* memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk mengambil peluang yang ada untuk mendorong kemajuan pariwisata negaranya. Dimana lebih dari 3 dekade, semua Menteri Pariwisata ASEAN, para ketua Organisasi Pariwisata Nasional ASEAN (NTOs), Asosiasi *Tour* dan *Travel* datang menghadiri bersama acara tahunan di ATF untuk mendiskusikan, meninjau dan menyusun strategi untuk terus

¹² Cohen, Erik (1996) *Thai Tourism: Hill tribes, islands and open-ended prostitution*. Bangkok: White Lotus Press

¹³ <http://www.atf-malaysia.com/index.php/atf-facts>), diakses pada 07 September 2015

melakukan promosi negara ASEAN sebagai tujuan utama wisata dunia. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Thailand turut berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan ATF dengan mengirimkan delegasi perwakilannya. Pada penyelenggaraan ATF 2011, di Phom Penh, Kamboja, para Menteri Pariwisata ASEAN menyepakati beberapa strategi pariwisata yang salah satunya adalah *ASEAN single visa*.

Pada awalnya sebelum menuju kepada rencana penerapan *ASEAN single visa*, Thailand melalui Perdana Menteri Thaksin Shinawatra telah mengusulkan gagasan penerapan *single visa* pada sub-region ASEAN yakin ACMECS (Ayeyawaday-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy), Thailand mengharapkan bahwa *single visa* dapat mempromosikan pariwisata kelima negara (Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam).

Berawal dari sana, Thailand kemudian mengharapkan bahwa rencana tersebut dapat dilaksanakan secara lebih luas dalam lingkup regional Asia Tenggara dengan mengangkat isu tersebut ke dalam ASEAN dan mendesak agar rencana dapat segera terwujud. Hingga akhirnya *single visa* masuk ke dalam salah satu fokus strategi pariwisata dalam ATSP. Kebijakan *ASEAN single visa* diharapkan dapat meningkatkan konektivitas kawasan intra-ASEAN bahkan secara luas meningkatkan kedatangan wisatawan.

Dengan diterapkannya kebijakan *single visa*, Thailand berharap untuk dalam negerinya dapat menjadi pintu gerbang utama atau pusat bagi kedatangan wisatawan di ASEAN. Karna jika dilihat dari letak

geografisnya yang strategis berada di jantung Asia Tenggara. Sedangkan untuk lingkup internasional, Thailand ingin meningkatkan keberadaan kawasan ASEAN yang dapat diwujudkan secara nyata dengan meningkatkan hubungan antar negara dan kerjasama dalam berbagai bidang.

Pada tanggal 09 November 2012, Thailand telah menandatangani perjanjian MRA-TP, penandatanganan dilakukan oleh Mr. Chumpol Silaparcha, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand di Central Plaza Ladprao Bangkok, disaksikan oleh Dr. Surin Pitsuwan, Sekretaris ASEAN, dan Duta Besar Negara-negara anggota ASEAN untuk Thailand. Dimana Thailand merupakan negara terakhir yang menandatangani perjanjian tersebut.

Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA-TP) merupakan perjanjian internasional yang di desain untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja profesional yang hendak mencari lapangan pekerjaan di negara anggota ASEAN lainnya. Pelaksanaan MRA-TP ini bersamaan dengan *ASEAN Economic Community (AEC)*.

Dalam kaitan ini, terdapat sejumlah hakikat dari MRA yaitu :

- a. Negara tujuan atau negara penerima mengakui kualifikasi profesional dan muatan latihan yang diperoleh dari negara pengirim atau negara asal tenaga kerja terampil.
- b. Negara asal diberikan otoritas untuk mengesahkan kualifikasi dan pelatihan dengan cara memberikan diploma atau sertifikat.

- c. Pengakuan tidak bersifat otomatis. Ada proses untuk penentuan standar dan persyaratan lainnya yang diterapkan baik di negara penerima maupun di negara asal.

Menteri Pariwisata dan Olah Raga Thailand memberikan respon positif mengenai pentingnya MRA-TP dalam rangka integrasi ASEAN dan upaya meningkatkan kualitas pariwisata khususnya tenaga kerja Thailand agar lebih kompetitif. Mengingat tanggal 31 Desember 2015 akan menjadi titik awal pewujudan *ASEAN Economic Community*. Dimana sepuluh anggota ASEAN akan bersaing satu sama lain dalam hal integrasi ekonomi regional, untuk memperkuat diri dalam menghadapi era globalisasi.

Implementasi Kebijakan Thailand Berpartisipasi Di *Asean Tourism Forum (ATF)* Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Tahun 2011-2015

Implementasi Kebijakan *Single Visa*
Thailand mengawali pelaksanaan kebijakan *single visa* dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Kamboja. Efektif sejak tanggal 27 Desember 2012, Thailand dan Kamboja memperkenalkan pembebasan visa untuk menandai ulang tahun ke-60 hubungan bilateral kedua negara. Awalnya, pembebasan visa timbal balik bagi Thailand dan Kamboja memungkinkan pemegang paspor untuk menetap selama dua minggu.

Thailand dan Kamboja adalah negara pertama di Asia Tenggara yang menandatangani ini. Perjanjian tersebut berada di bawah kerangka Kerjasama Ekonomi Strategi Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS). Kerja sama sub-kawasan dan kerangka kerja

yang implementatif dapat membantu cita-cita ASEAN untuk membentuk pariwisata tunggal, terutama untuk mendukung kerangka strategi langsung ketiga dari ATSP. Salah satu cara untuk mendorong *single visa* adalah dengan melihat kemungkinan-kemungkinan rencana inovasi visa yang dapat memfasilitasi perjalanan.¹⁴

Pengunjung dari 35 negara yang memenuhi syarat untuk visa tunggal dapat menetap hingga 60 hari di Thailand dan 60 hari di Kamboja. Wisatawan akan dapat mengajukan permohonan visa di konsulat / kedutaan Thailand atau Kamboja. Biaya visa dikumpulkan pada titik aplikasi yang mirip dengan biaya visa turis normal bahwa negara (Biaya visa turis untuk aplikasi di Royal Thai Embassy), dan biaya tambahan, mirip dengan biaya visa turis normal negara lainnya, akan dikumpulkan di pos pemeriksaan perbatasan internasional dari negara lain. ACMECS Visa Tunggal memungkinkan pelamar untuk menghemat waktu untuk proses aplikasi visa bagi kedua negara.

Daftar 35 Negara yang warganya dapat mengajukan permohonan untuk ACMECS Visa Tunggal tersebut adalah Australia, Austria, Belgia, Bahrain, Kanada, Republik Rakyat Cina, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani,

¹⁴ Activities Advocate for a single visa for the ASEAN region; (1) Continue to work towards a single visa for the region by identify obstacles and opportunities and working with the relevant groups within ASEAN. (2) Define the case for and advocate the implementation of an e-visa system. (3) Explore the possibility for innovative visa arrangements that facilitate travel.” Lihat ASEAN Tourism Strategic Plan, Hlm. 76.

Hong Kong, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, India, Jepang, Korea, Kuwait, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Oman, Portugal, Qatar, Spanyol, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Turki, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat.¹⁵

Persiapan Implementasi Kebijakan *Mutual Recognition Arrangement On Tourism Professionals (Mra-Tp)*

Pemerintah Thailand melakukan berbagai pelatihan, khususnya untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing kepada tenaga kerja lokal Thailand, sehingga nantinya mereka akan siap bersaing baik di dalam negeri maupun di negara-negara ASEAN lainnya. Di samping mengadakan berbagai training bagi penduduk lokal Thailand, pemerintah Thailand juga memberikan bantuan dana bagi pengadaan pelatihan di negara Kamboja, Laos, dan Myanmar. Selama ini, banyak tenaga kerja asing yang berasal dari Negara-negara, seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja, yang bekerja di Thailand. Akan tetapi, mayoritas dari pekerja tersebut tidak memiliki kualifikasi yang baik.

Dengan adanya MRA-TP ini, Thailand melihat bahwa implementasinya akan memberikan kemajuan bagi industri pariwisata ASEAN karena di dalam MRA-TP ini terdapat standar-standar yang menjadi acuan Negara-negara ASEAN dalam kualifikasi tenaga kerja profesional. Pemerintah Thailand memberikan respon yang positif bagi implementasi MRATP karena pemerintah melihat bahwa MRA-TP dapat memberikan manfaat bagi Thailand, khususnya

dalam menyerap tenaga kerja profesional yang akan berpengaruh terhadap prospek pariwisata Thailand di masa depan.

V. Kesimpulan

Pariwisata telah berkembang menjadi sebuah industri besar yang mendukung perekonomian di banyak negara dunia, terlebih saat berbagai negara lain mengalami krisis ekonomi. Hal tersebut menjadikan pariwisata sebagai salah satu prioritas pengembangan oleh berbagai negara karena cenderung dapat terus berkembang dan menghasilkan pendapatan, meskipun krisis masih melanda. Ini dapat terjadi karena pariwisata menghasilkan devisa yang besar dengan adanya kedatangan wisatawan mancanegara yang mengunjungi sebuah negara.

Upaya pemerintah negara-negara ASEAN untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu strategi pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan pembangunan kawasan, mendorong ASEAN untuk membentuk suatu pola kerjasama yang lebih komprehensif dan strategis. Pembentukan pola kerjasama tersebut dirancang dalam pertemuan tingkat menteri pariwisata ASEAN (ATMM) dan forum pariwisata ASEAN (ATF). Dalam pertemuan tersebut, negara-negara ASEAN mulai merancang *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2011-2015* sebagai pengganti *Roadmap for Integration of Tourism Sector (RITS)* yang berakhir tahun 2010.

Secara rutin kegiatan ATF diselenggarakan setiap tahunnya dengan melibatkan semua sektor industri pariwisata dari seluruh negara anggota ASEAN. Di tahun 2011, disepakati rencana penerapan kebijakan *single visa* merupakan bagian dari strategi

¹⁵ *ACMECS Single Visa application now opens for citizen of 35* dalam <www.thaiembassy.sg> diakses pada 29 April 2015

pariwisata terkait dengan peningkatan dan percepatan fasilitas perjalanan serta konektivitas ASEAN. Dimana sebelumnya Thailand melalui Perdana Menteri Thaksin Shinawatra telah mengusulkan gagasan penerapan *single visa* pada sub-region ASEAN yakin ACMECS (Ayeyawaday-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy).

Kepentingan Thailand dalam bidang politik dapat dilihat pada lingkup domestik dan internasional. Dalam lingkup internasional, Thailand ingin meningkatkan keberadaan kawasan ASEAN yang dapat diwujudkan secara nyata dengan meningkatkan hubungan antar negara dan kerjasama dalam berbagai bidang. Selain itu, Thailand ingin dapat menambah pengaruh negaranya

terhadap negara lain terutama di bidang pariwisata. Sedangkan di dalam negara, Thailand berharap dapat menjadi pintu gerbang utama atau pusat bagi kedatangan wisatawan di kawasan ASEAN. Selanjutnya dalam bidang ekonomi-sosial, kepentingan Thailand adalah untuk memberikan jawaban atau solusi terhadap keluhan para wisatawan yang menganggap bahwa mengurus surat izin visa di kawasan ASEAN cukup rumit. Kemudian, dengan kemudahan tersebut Thailand ingin meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan yang semakin banyak khususnya di dalam negaranya. Selain itu, Thailand menginginkan adanya peningkatan jumlah devisa di dalam negara. Serta tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh tempat di berbagai daerah dalam negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Cohen, Erik (1996) *Thai Tourism: Hill tribes, islands and open-ended prostitution*. Bangkok: White Lotus Press

David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", *World*

Politics, Vol. 14, No. (1961)

Geliat Sektor Pariwisata ASEAN dalam Buletin Komunitas ASEAN Edisi 4/ Maret 2014

I Putu Sudana, 2013. *Strategi Pengembangan Desa Wisata Ekologis Di Desa*

Belimbing, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Jurnal Pariwisata Vol.13 No.1 2013. (Universitas Udayana)

Jack C Plano, Robert E Riggs, Helenan S. Robin, Kamus Analisa Politik. Jakarta.

Rajawali pers, 1958.

John T Rourke, *International Politics on the World Stage, 5th ed.*, (Connecticut:

Dushking Publishing Group, 1995)

Kenneth Waltz, *Man, the State and War* (New York: Columbia University Press, 2001)

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosadakarya,

Bandung.

Mulyadi A.J. 2010. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yessi Olivia, *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*, Jurnal

Transnasional, Vol. 5, No. 1, Juli 2013. (Universitas Riau)

ACMECS Single Visa application now opens for citizen of 35 dalam

www.thaiembassy.sg diakses pada 29 April 2015

<http://www.atf-malaysia.com/index.php/atf-facts>), diakses pada 07 September 2015

Thailand targetkan 3 besar dunia dalam

[http://www.bnsp.go.id/mod_lsp/content_lsp/009?id=17&menu=Thailand Targetkan 3 besar wisata dunia](http://www.bnsp.go.id/mod_lsp/content_lsp/009?id=17&menu=Thailand%20Targetkan%203%20besar%20wisata%20dunia) diakses pada 26 April 2015